

## BAB V

### SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

#### A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah di proksikan dengan rasio kemandirian. Penelitian ini menggunakan sampel kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY periode 2010-2012.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk yang memoderasi belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah berhasil diterima dalam penelitian ini. Sedangkan untuk dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan jumlah penduduk yang memoderasi antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh dalam penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai prakarsa dan inisiatif daerah. Dengan penggalan dan pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan urusan daerah.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam belanja modal adalah jumlah penduduk. Jika suatu daerah mempunyai penduduk yang banyak maka pengeluaran pemerintah untuk menambah asset jangka panjang juga semakin banyak. Banyaknya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk publik maka mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah juga baik.

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan dari pusat kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Semakin banyak dana yang diterima oleh daerah menunjukkan daerah masih sangat bergantung kepada pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat seharusnya diiringi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Jika suatu daerah pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi kinerja keuangan pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan dapat disebabkan investasi yang diberikan pemerintah kepada daerah masih kurang, sehingga fasilitas dan sarana prasana yang mendukung kegiatan ekonomi belum memadai.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan publik dalam jangka panjang. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Jika pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan publik daerahnya untuk mendorong aktivitas masyarakat maka dikatakan kinerja keuangan daerahnya menurun.

Daerah dengan sumber pendapatan asli daerah yang banyak dan jumlah penduduk yang banyak diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat. Jika jumlah penduduk suatu daerah banyak tetapi belum bisa secara optimal mengelola dan mengolah sumber pendapatan asli daerah menjadi kegiatan ekonomi maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti, diantaranya adalah:

1. Menambah jumlah sampel dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi.
2. Menambah variabel lain yang dapat menjadi proksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah periode penelitian.
3. Menambah penggunaan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang lain dalam penelitian selanjutnya seperti rasio aktivitas dan rasio efisiensi.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan DIY sehingga penelitian tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum.

2. Proksi yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan rasio kemandirian saja, sementara ada banyak rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio aktivitas, rasio efisinsi, dan rasio efektivitas.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat buah variabel independen yang dikategorikan dalam faktor finansial (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal) dan non finansial (Pertumbuhan Ekonomi). Sementara terdapat faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu lingkungan, finansial dan organisasional.